

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. D. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergitas dengan kepala desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Andianto, Nuryaman dan Veronica Christina. (2015). **Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori Dan Praktik. Cetakan Pertama. Bogor:** Ghalia Indonesia.
- Aprisiami, Putriyanti. (2012). Penerapan Otonomi Desa Dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Ponorogo. **Jurnal Ilmiah** Vol.03 No.11.
- Ardiyanti. Rika. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. **Skripsi.** Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Assegaf, S. D. I. (2017). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep. **Skripsi.** Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2003). **Indikator dan alat ukur prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.** Jakarta.
- Debi Putri Pertiwi. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran *Berkonsep Value For Money* Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Skpd Provinsi Riau) Vol. 2 No. 2 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=384660&val=6445&> Diakses 20 November 2019.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). **Jurnal Ilmiah Edunomika**, 3(02).
- Didjaja, Mustofa. (2003). **Transparansi Pemerintah.** Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. (2006). **Mewujudkan Good Governance Melayani Publik.** Yogyakarta: Gadjah Mada University

- Ghozali, Imam. (2013). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi**. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Imam. (2016). **Pengantar Statistika Inferensial**, Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta. Rajawali Pers.
- Harjono, dkk. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan anggaran. ***Binus Business Review***. Vol.5, No.2, Hlm.537-550.
- Herli, Mohammad dan Hafidhah, (2017). Peran pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan di desa. ***Jurnal***. Vol.VII, No.1, Hlm 43-52.
- https://dosenppkn.com/pengertian-dana-desa/#Tujuan_Dana_Desa
- <https://madiunkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/5a20bdf7c564acb1df32aa45/kecamatan-dolopo-dalam-angka-2019.html>
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). **Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah** Jakarta: Citra Utama.
- Kumalasari, Deti dan Ikhsan Budi Riharjo, (2016). Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. ***Jurnal***. Vol.5, No.11, Hlm 1-15.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, (2000). **Akuntabilitas dan Good Governance**, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003). **Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. Jakarta.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. ***Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA0)***, 7(1).
- Mahmudi. (2010). **Manajemen Keuangan**. Jakarta: Airlangga.
- Mahmudi. (2013). **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2015). **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta.UII Press.

- Muhamad, Ikbal dan Halim, Abdul. (2012). **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nasehatun, Lina dan Nur Anisa, (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang. **Jurnal**. Vol.10, No.2, Hlm 273-288.
- Peraturan Bupati Ponorogo. No.16 Tahun 2015 Tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.22 Tahun. 2016 **Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa**.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 **Tentang Pengelolaan Dana Desa**
- Pradana, I Made dan Ayu Komang, Anantawikrama. (2014). *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali* (Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah).
- Prasojo, E. dan T. Kurniawan. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance Kasus Best Practices dan Sejumlah Daerah di Indonesia. Makalah disajikan dalam The 5th International Symposium of **Jurnal Antropologi Indonesia**. Banjarmasin.
- Puji, Titiek Astuti dan Yulianto, (2016). Good Governace pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No.6 tahun 2014. **Jurnal**. Vol.11, No.1, Hlm 1-14.
- Putra, I Made Yoga Darma dan Rasmini, Ni Ketut. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. **E-Jurnal Akuntansi**. Vol.28.1.Juli (2019): 132-158, ISSN: 2302-8556.
- Rahman, Muh. Aqil., Suwandi, Memen., Hamid, Alfian. (2015). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). **Jurnal**. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Roberto, Silas., Lutfi, Muhtar., Nurnaningsih. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal IDEAL. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Palu.

Santoso, Singgih. (2012). **Statistik Parametrik**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Santoso, Slamet. (2015). Penelitian Kuantitatif : **Metode dan Langkah Pengolahan Data**. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.

Saputra, Prayozza. (2014). Optimalisasi Peran badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. **Skripsi**. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Sekaran, Uma.(2009). **Metode Penelitian Untuk Bisnis**. Jakarta: Salemba Empat.

Septiviasuti, Umi. (2018). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sopannah dan Mardiasmo, (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. **SNAVI**. Surabaya.

Subroto. A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. http://eprints.undips.ac.id/7610/J/Agus_Subroto.pdf. Di Akses 25 November 2019. pukul 19.00 WIB.

Sufren & Natanael, Yonathan. (2014). Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono, (2017). **Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**. Bandung: Alfabeta.

Sukmawati, Fitri. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). **Jurnal Ilmiah Bisnis Pasar Modal dan UMKM**. Volume 2 No.01

Sulistiyani. (2004). **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan** .Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umami, Risya dan Idang Nurodin. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa . **Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi**, Volume 6 Edisi 11.

Ultafiah, Weny. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 **Tentang Desa**.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintah Daerah**.

Undang-Undang No.60 Tahun 2014 **Tentang Dana Desa**.

Wardoyo, G. P. (2010). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Wiratna, V. Sujarweni, (2015). **Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi**. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Wiyono, Gendro. (2011). **3 in 1 Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0**, Edisi Pertama Cetakan Pertama. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

